

**LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS KELOMPOK DOSEN**



**PENDAMPINGAN PEREMPUAN PELAKU UMKM
di KOTA PADANG**

SPK No : 02/PM/SPK/PNP/FISIP-UNAND/2021

Tanggal : 1 Juli 2021

Anita Afriani S, S.IP., M.Si./ NIP. 198204132008122002	(Ketua)
Silvy Cory, S.Pd., M.Si./ NIP. 198604212019032012	(Anggota)
Putiviola Elian Nasir, SS., MA./ NIP. 198706252019032011	(Anggota)
Inda Mustika Permata, S.IP., MA./ NIP. 199112262019032015	(Anggota)
Zakiah Darajat/ NIM. 1810851004	(Mahasiswa)
Tania/ NIM. 1810851007	(Mahasiswa)
Salma Mutiara Asri/ NIM. 1810851020	(Mahasiswa)
Azhari/ NIM. 1810852020	(Mahasiswa)

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS KELOMPOK DOSEN**

Judul Pengabdian : Pendampingan Perempuan Pelaku UMKM
di Kota Padang

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Anita Afriani S, S.IP., M.Si.
b. NIDN : 0013048206
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
e. Nomor HP : 085278550006
f. Alamat surel (e-mail) : anitaafriani@soc.unand.ac.id,
nanisinulingga@gmail.com

Anggota Pengabdian : 1. Silvy Cory, S.Pd., M.Si
2. Putiviola Elian Nasir, SS., MA
3. Inda Mustika Permata, S.IP., MA

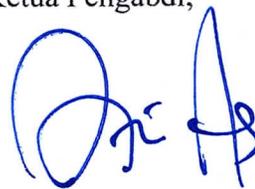
Jumlah mahasiswa yang terlintas : 4 orang
Lokasi Kegiatan : Kota Padang
Lama Kegiatan : 1 tahun
Biaya Pengabdian : Rp. 3.500.000,-
Sumber dana : FISIP Unand

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Elfitra, M. Si
NIP. 196907011995121002

Padang, 05 November 2021
Ketua Pengabdian,



Anita Afriani S, S. IP, M. Si
NIP. 198204132008122002

Menyetujui,
Dekan

Dr. Azwar, M. Si
NIP. 196712261993031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pandemi Covid-19 mempunyai dampak pada ekonomi global termasuk Indonesia. World Bank memproyeksikan jika pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun ke 2,1 persen (Susilawati et al., 2020). Badan Pusat Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I (Januari - Maret) tahun 2020 yang hanya tumbuh 2,97 persen. Angka ini melambat dari 4,97 persen pada Kuartal IV 2019. Bahkan, pertumbuhan jauh di bawah pencapaian Kuartal I 2019 yang mencapai 5,07 persen. Dan pada Kuartal II Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen (Wuryandani, 2020). Data di atas menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 secara nyata berdampak signifikan pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Wilayah Sumatera Barat adalah salah satu zona merah penyebaran virus covid-19. Kasus Covid-19 pertama di Sumatera Barat terkonfirmasi pada tanggal 26 Maret 2021 (Harlina, 2021). Sumatera Barat juga mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Lembaga Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, pendapatan perusahaan di Sumatera Barat pada tahun 2020 menurun sebesar 66 persen. Usaha Menengah Besar (UMB) turun sebesar 68,11 persen dan Usaha Menengah Kecil (UMK) turun sebesar 46,74 persen. Sekitar 50,27 persen UMK dan 64,56 persen UMB menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional (BPS, 2020). Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumatera Barat, menyatakan bahwa sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang paling terdampak karena Covid-19, dengan jumlah 99.93 persen daripada usaha besar (Langgam.id, 2020). Dari data di atas dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat melambat. Akibat melesunya pendapatan berbagai badan usaha dan perusahaan di Sumatera Barat mengakibatkan banyaknya pengangguran yang kemudian tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Pada bulan Agustus 2020, terdapat 35.457 orang yang sebelumnya bekerja kemudian menjadi pengangguran akibat pandemi Covid-19 di Sumatera Barat (Hendra, 2020).

Berdasarkan data yang dipaparkan tersebut, pandemi Covid-

19 berimbas pada pertumbuhan ekonomi, menurunnya pendapatan, dan menyebabkan pengangguran. Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang berkomitmen pada program Sustainable Development Goals (SDG's) yang ditunjukkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang rencana aksi daerah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat 2018 -2021, juga menghadapi kendala dalam mengimplementasikan komitmennya karena pandemi Covid-19. SDG's sendiri merupakan cetak biru yang terdiri dari 17 poin, kemudian diadopsi oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kesejahteraan dan perdamaian di dunia pada tahun 2030 (UN, 2021).

Salah satu poin SDG's adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang bersifat sebagai poin kedelapan dan tentu saja pencapaian poin mengalami hambatan akibat Pandemi covid-19. Namun tidak hanya pada poin ke- 8, Pandemi Covid-19 juga berdampak pada target SDG's pada poin ke-5, yakni kesetaraan gender. Perempuan adalah pihak yang menanggung beban tambahan akibat adanya pandemi covid-19 (UN, 2021). Perempuan juga menghadapi tantangan di sektor ekonomi karena banyak perempuan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan, serta perempuan pelaku usaha ultramikro yang terancam karena distribusi dan pasar yang minim. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan perempuan dan anak semakin rentan karena dampak virus corona baru penyebab penyakit Covid-19 (Samodro, 2020). Selain itu, melalui risetnya terkait kelompok usaha kecil, Iwan Setiyoko, Direktur YSKK (Yayasan Satu Karsa Karya), menyampaikan bahwa usaha mikro dan kecil yang digerakkan oleh perempuan lebih terdampak karena pandemi. Menurutnya, kelompok ini tidak terdata oleh dinas terkait, sehingga kelompok usaha perempuan ini tidak mendapat akses bantuan keuangan dan

pemasaran, padahal kelompok perempuan ini memiliki produk-produk yang diusahakan (Sucahyo,2020). Riset tersebut membuktikan bahwa perlunya upaya untuk memperkuat daya tahan pelaku usaha perempuan agar tetap bisa berproduksi di masa pandemi ini sebagai bentuk komitmen mencapai poin ke-5 dan ke-8 dalam SDG's.

1.2 Perumusan Masalah

Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian menjadi melesu. Kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi juga berimplikasi terhadap aktivitas perekonomian. Terlebih Sumatera Barat hampir pelaku usahanya adalah skala kecil dan menengah. Akibatnya, banyak usaha yang gulung tikar dan menciptakan banyak pengangguran. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa Covid-19 menyebabkan perempuan sebagai pihak yang rentan. Kerentanan ini berkaitan dengan aspek kesehatan maupun perekonomian. Pada bidang perekonomian terlihat bahwa kelompok usaha perempuan kurang mendapat perhatian dari segi bantuan keuangan dan pemasaran. Fenomena ini tentu menjadi tantangan bagi Sumatera Barat dalam komitmennya mencapai misi SDG's poin ke-5 dan ke-8. Maka dari itu perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meringankan krisis yang sedang terjadi.

1.3 Tujuan Kegiatan

Pengabdian ini bertujuan untuk mewujudkan pencapaian SDG's di Sumatera Barat dengan pemberdayaan perempuan yang menjadi pelaku UMKM di Sumatera Barat khususnya di Padang sebagai lokasi pengabdian.

1.4 Manfaat Kegiatan

Pengabdian ini dapat bermanfaat secara langsung kepada kelompok usaha perempuan melalui pendampingan yang dilakukan. Di samping itu, pengabdian ini juga bermanfaat sebagai wujud praktik dari keilmuan HI, khususnya dari segi intermestik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rezim Pembangunan Dunia (Sustainable Development Goals)

Ikut berdampaknya pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 terhadap pelaku usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan di Kota Padang telah menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Berkurangnya permintaan masyarakat terhadap produk baik barang dan jasa selama masa Pandemi Covid-19 karena dibatasinya aktifitas masyarakat selama masa pandemi Covid-19 dan menurunnya pendapatan masyarakat membuat kinerja UMKM mengalami penurunan dan bahkan berhenti. Segenap pihak harus berperan aktif agar permasalahan ini dapat dicarikan solusinya dan diatasi dengan baik dan efektif. Sejauh ini Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan berbagai usaha untuk membantu pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19, diantaranya yaitu dengan memberikan bantuan stimulan seperti keringan kredit dan bunga pinjaman bagi pelaku UMKM Kota Padang (www.langgam.id). Tidak hanya bentuk bantuan yang dikelola oleh pemerintah, usaha untuk membantu perempuan pelaku UMKM di Kota Padang juga harus didukung oleh berbagai pihak seperti lembaga masyarakat, akademisi dan instansi atau organisasi lainnya.

Bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dan pihak-pihak lainnya yang tertarik untuk membantu pelaku UMKM khususnya yang dikelola oleh perempuan merupakan sebuah usaha yang ikut mendukung dan sejalan dengan implementasi program-program pembangunan global yang dimiliki oleh *United Nations Development Programs* (UNDP). Program pembangunan global ini dikenal juga dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki 17 program kerja atau tujuan pembangunan global. Tujuan global ini mencakupi berbagai sektor kehidupan masyarakat yaitu *no poverty, zero hunger, good health and well being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below*

water, life on land, peace justice and strong institutions, dan partnership for the goals. (<https://sdgs.un.org/goals>)

Sejalannya usaha untuk membantu UMKM yang terdampak oleh pandemi Covid-19 terutama yang dikelola oleh perempuan di Kota Padang dengan nilai-nilai SDGs menandakan adanya partisipasi dan dukungan pihak lokal terhadap kerja dan proram pembangunan global. Ditengah usaha bersama negara-negara yang tergabung dalam *United Nations* (UN) untuk membangun pembangunan global yang berkelanjutan, kita masyarakat Indonesia mampu memperlihatkan bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan global yang terdapat dalam SDGS. Namun bentuk dukungan dan partisipasi ini harus terus ditingkatkan agar tercapainya pembangunan global yang berkelanjutan.

Secara umum, Hubungan Internasional (HI) merupakan studi yang mengkaji interaksi antar aktor internasional baik aktor negara dan non negara. SDGs sebagai program pembangunan global yang dimiliki oleh UNDP dan diaplikasikan oleh berbagai negara dan berbagai pihak lainnya merupakan sebuah topik yang masuk kedalam kajian Hubungan Internasional (HI). SDGs yang dicetus oleh UNDP yang juga merupakan bagian dari UN serta disebarakan diberbagai negara dan disambut dengan baik oleh berbagai kelompok masyarakat di berbagai negara adalah hal sangat menarik untuk dilihat dari sudut pandang HI. Oleh karena itu sangat sesuai ketika membahas aplikasi SDGs diberbagai negara termasuk Kota Padang sebagai sebuah kota yang dimiliki oleh Indonesia.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas (HI UNAND) memiliki fokus kajian HI yaitu dengan mengedepankan nilai intermestik (internasional-domestik) yaitu membawa nilai-nilai internasional ke dalam lingkup domestik. Salah satu tujuan aplikasi intermestik HI yang dilakukan adalah untuk dapat menumbuhkan pemahaman HI di ranah domestik atau daerah. Manfaat yang dapat diambil bagi berbagai pihak diantaranya yaitu kemampuan untuk dapat melihat fenomena global di tingkat domestik atau daerah. Hal ini sangat penting karena dizaman globalisasi saat ini semua negara dan semua daerah sudah saling terhubung baik secara sosial, ekonomi dan komunikasi.

Bentuk partisipasi dan dukungan berbagai pihak di Kota Padang dalam membantu UMKM yang bermasalah akibat pandemi Covid-19 seperti pemberian

pendampingan merupakan sebuah bentuk aplikasi HI yang bersifat intermestik yaitu SDGs dengan agenda global ikut diimplementasikan oleh masyarakat global dalam hal ini yaitu pemerintah, organisasi dan akademisi kota Padang. Selanjutnya juga terlihat bagaimana bentuk interaksi antara instansi dan aktor tingkat lokal atau domestik dalam merespon nilai-nilai yang bersifat global dalam hal ini yaitu SDGs. Dengan pelaksanaan pemberian bantuan terhadap UMKM seperti pemberian pendampingan yang bertujuan agar mereka dapat bertahan dan berhasil menghadapi kesulitan yang diakibatkan oleh Pandemi merupakan usaha di tingkat lokal atau daerah yang sangat dibutuhkan saat ini ketika dunia sedang berusaha untuk membangun kembali berbagai sektor seperti ekonomi, pembangunan, perempuan, dan lain sebagainya yang tergabung dalam SDGs.

2.2 Pemberdayaan Perempuan

Pembangunan internasional atau pembangunan global merupakan konsep yang mengakui bahwa terjadi perbedaan tingkat pembangunan masyarakat secara global. Hal ini bukan hanya menjadi ancaman bagi negara-negara, namun merupakan penghambat kemajuan global. Kekeliruan umum yang terjadi adalah mengaitkan pembangunan hanya kepada sektor ekonomi yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Kenyataannya, kontribusi pada pembangunan juga melingkupi kesehatan, pendidikan, lingkungan dan bahkan stabilitas negara/bangsa terkait konflik dan perdamaian. Dengan memahami beragam sektor yang berpengaruh terhadap pembangunan, pada bulan September 2000, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandatangani United Nations Millenium Declaration yang menandakan komitmen dunia untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, diskriminasi terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan (World Health Organization 2018). Perjuangan ini dilanjutkan pada tahun 2015, setelah berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) dengan mengembangkan delapan tujuan yang menjadi fokus MDGs, menjadi 17 tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) (World Health Organization 2021c). Sama seperti dalam MDGs, kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan SDGs yang harus dicapai oleh negara-negara PBB pada tahun 2030. Hal ini dikarenakan kesetaraan gender bukan hanya merupakan masalah

minoritas mendapatkan hak asasinya, namun lebih jauh lagi, kesetaraan gender merupakan “ ... a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world” (United Nations n.d.).

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu modal untuk mencapai kesetaraan gender. Sebelum kehadiran MDGs dan SDGs, istilah ‘kesetaraan gender’ dan ‘pemberdayaan perempuan’ sudah lebih dahulu diperkenalkan dan diperjuangkan oleh para feminis pada tahun 1980-1990an, hingga istilah ini berhasil menjadi pergerakan dan agenda pembangunan global (Cornwall and Rivas 2015). Sejak kemunculannya hingga sekarang, pemberdayaan perempuan bukan hanya berada dalam kerangka SDGs namun mengambil beragam bentuk aktivitas dan dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk aktor non-negara.

Konsep ini berpegang pada pemberian kekuatan kepada perempuan dengan cara memahami kebutuhan diri dan bagaimana perempuan menilai dan menghargai diri mereka sendiri, “*Women’s empowerment can be defined to promoting women’s sense of self-worth, their ability to determine their own choices, and their right to influence social change for themselves and others*” (World Vision 2021). Secara lebih rinci, ‘*women empowerment*’ memiliki aspek-aspek seperti adanya pihak yang tidak berdaya, dalam hal ini adalah perempuan; pemberdayaan hanya bisa difasilitasi oleh pihak ketiga namun pemberdayaan itu sendiri hanya bisa diwujudkan oleh pihak yang membutuhkannya, artinya harus ada penerimaan dan usaha; pemberdayaan merupakan upaya pengambilan keputusan terkhusus untuk hal-hal yang penting, baik secara individual maupun kolektif; dan yang terakhir, pemberdayaan merupakan proses dan bukan hasil akhir (Mosedale 2005).

Gender Empowerment Measure (GEM) mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dari tiga sektor yaitu partisipasi perempuan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, serta kekuasaan (kepemilikan) atas sumber ekonomi (World Health Organization 2021a). Pengukuran lain terkait dengan pemberdayaan perempuan adalah Gender Inequality Index (GII). Fungsi dari GII pada dasarnya mengukur ketidaksetaraan gender dari tiga area yaitu kesehatan, pemberdayaan dan status ekonomi perempuan (United Nations Development Program, n.d.). Dalam GII,

pemberdayaan diukur dengan melihat jumlah kursi pemerintahan yang didukui oleh perempuan dan laki-laki, serta jumlah tingkat pendidikan sekunder masing-masing jenis kelamin (World Health Organization 2021b). Dapat dilihat dari kedua alat pengukur ini, bahwa walaupun ketidaksetaraan tidak terbatas pada hal di atas dan cara pemberdayaannya dapat beragam, dunia internasional sepakat ketidaksetaraan serta pemberdayaan kepada pada perempuan berputar di sektor ekonomi, politik dan pendidikan.

Kesetaraan gender telah terbukti memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan walaupun terdapat perbedaan dari segi negara, bangsa, durasi dan model pelaksanaannya, hasilnya selalu sama (Kabeer 2016); dengan tingkatan berbeda. Dampak positif dari pemberdayaan perempuan akan mendorong tercapainya keadaan ekonomi yang lebih kuat, memajukan bisnis, dan kehidupan masyarakat yang lebih stabil, adil dan sejahtera (UN Women and UN Global Compact Office 2011), sehingga pada akhirnya akan menciptakan pembangunan, mulai dari tingkat lokal, nasional hingga global. Hal ini didukung oleh Esther Duflo, yang menekankan bahwa “*empowerment can, in other words, accelerate development*” (Duflo 2012). Namun pada kenyataannya, ketidakadilan dan diskriminasi terus perempuan hadapi dalam sektor ekonomi, terutama dalam dunia kerja. UN Women dan UN Global Compact Office menciptakan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan untuk sektor swasta yang menjadi dasar dan petunjuk dalam menciptakan kebijakan dan program yang mampu menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan pemberdayaan yang merata di lingkungan kerja. Berikut prinsip pemberdayaan perempuan menurut UN Women dan UN Global Compact Office (2011):

1. *Leadership promotes gender equality*: memiliki program dan kebijakan yang gender responsif dan gender sensitif, melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal dalam pelaksanaan program dan kebijakan tersebut.
2. *Equal opportunity, inclusion and nondiscrimination*: menetapkan gaji yang sama, bebas dari diskriminasi berbasis gender, penerimaan pegawai yang didasari atas prinsip sensitif gender, menyediakan layanan dan informasi terkait kebutuhan beban tanggungan (anak) terhadap perempuan dan laki-laki.

3. *Health, safety and freedom from violence*: menetapkan aturan *zero-tolerance* terhadap kekerasan, mengidentifikasi masalah keamanan kerja, memastikan adanya asuransi kesehatan untuk pegawai, dst.
4. *Education and training*: memastikan keadilan dalam kesempatan untuk mengembangkan diri, dst.
5. *Enterprise development, supply chain, and marketing practices*: menghormati perempuan dalam media marketing yang digunakan, ekspansi kepada bisnis yang dimiliki perempuan, dst.
6. *Community leadership and engagement*: memperjuangkan kesetaraan melalui inisiatif dan advokasi komunitas.
7. *Transparency measuring and reporting*: Mengukur dan melaporkan secara publik kemajuan untuk menciptakan kesetaraan gender.

Prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan UN Women dan UN Global Compact Office merupakan respon terhadap semakin banyaknya perempuan yang mulai menjadi pekerja formal, namun tetap mengalami diskriminasi. Walaupun belum mencapai kesetaraan yang diinginkan, gambaran ini lebih baik dari keadaan beberapa dekade lalu di mana perempuan tidak dianggap sebagai pemeran penting dalam proses ekonomi, sehingga tidak diikutsertakan dalam kebijakan dan program-program pembangunan (Mehra 1997). Pada masa itu, pemahaman yang umum adalah bahwa kemajuan ekonomi yang mampu memberdayakan perempuan, padahal pada kenyataannya, hubungan antara ekonomi dan kesetaraan gender (termasuk pemberdayaan perempuan) adalah saling mempengaruhi. Melihat perkembangan yang terjadi, sebagian masyarakat dunia merasa optimis terhadap perkembangan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan kemajuan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang semakin baik masih belum mampu menjamin pemberdayaan perempuan, hal ini dikarenakan oleh berbagai hal seperti pola pertumbuhan (dan bukan kecepatan) yang menentukan distribusi berbasis gender dari kesempatan ekonomi, peran aktif pemerintah yang berbeda dari satu negara dengan negara lainnya dalam mempromosikan kesetaraan gender, dan struktur patriarki (Kabeer 2016).

BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Khalayak Sasaran

Adapun target sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok perempuan pelaku usaha dalam skala kecil dan menengah (UMKM) di Kota Padang.

3.2 Metode Penerapan IPTEKS

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan sebagai berikut

- a. Metode ceramah berisi sosialisasi yang bersifat persuasif menggunakan multi media
- b. Diskusi dan *sharing* berupa *best practice* dari pengusaha perempuan
- c. Pelatihan pendampingan terhadap kelompok pelaku usaha perempuan skala mikro dan menengah ini dengan melakukan transfer pengetahuan dalam proses pemasaran produk dalam skala regional, hingga internasional. Kegiatan ini akan dilakukan melalui kemitraan dengan beberapa pihak antara lain:
 1. Koperasi Mandiri dan Merdeka
 2. Perusahaan Pengekspor Copra “Copra Indonesia”

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

1. Kunjungan kepada Pelaku Usaha

Sesuai dengan kriteria yang tim tetapkan yaitu pelaku usaha perempuan skala mikro dan menengah, tim memilih pelaku usaha di bidang kue kecil dan bolu atas nama Rina, yang bertempat tinggal di Jalan Perumahan Hijau Daun Regency Blok A. Nomor 13 di Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, kota Padang Sumatera Barat. Selain dikarenakan target merupakan pelaku usaha perempuan skala mikro dan menengah, pemilihan juga didasari atas kondisi Rina, di mana merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi keluarga dengan seorang suami dan tiga orang anak. Suaminya berprofesi sebagai pengemudi ojek yang juga membantu dalam mengantarkan pesanan pelanggan Rina. Kunjungan dilakukan beberapa kali di mana kunjungan pertama merupakan usaha awal dalam mengidentifikasi masalah dari pelaku usaha atau analisis situasi. Kunjungan berikutnya dilakukan setelah ada diskusi dengan mitra tim, terkait apa saja yang bisa ditawarkan sebagai bantuan bagi pelaku usaha. Kunjungan terakhir merupakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan bersama mitra.

2. Identifikasi Permasalahan Pelaku Usaha

Sebelum melakukan kunjungan, komunikasi telah dilakukan oleh ketua tim pengabdian dengan sasaran melalui media telepon dan aplikasi pengiriman pesan (Whatsapp). Dari hasil diskusi, kunjungan pertama dilakukan pada hari Minggu, 12 September 2021 di kediaman Rina. Tahap pertama yang tim lakukan adalah diskusi terkait usaha yang dijalankan, berikut dengan kesulitan yang dihadapi. Berikut identifikasi permasalahan sasaran dalam menjalankan usahanya:

- a. pengetahuan tentang bisnis yang masih sangat lemah serta kurangnya pengalaman dalam berbisnis;
- b. permasalahan terkait *branding*;
- c. tidak adanya kekhasan.



Gambar 1. Diskusi tim pengabdian dengan Rina dan suami

Permasalahan pertama sebenarnya dapat mencakup permasalahan kedua dan ketiga. Namun dalam hal ini akan dipisah karena masalah pertama akan difokuskan kepada manajemen bisnis. Rina mengakui bahwa sebelumnya tidak memiliki keterampilan dalam membuat kue kecil maupun bolu. Hal ini ditekuni lantaran kebutuhan keluarga termasuk untuk biaya hidup sehari-hari dan pendidikan anak-anaknya. Rina sendiri melalui pendidikan sarjana, namun tidak di bidang manajemen ataupun bisnis, dan belum pernah mengikuti pelatihan terkait usaha mikro, kecil dan menengah.

Pengetahuan serta pengalaman berbisnis yang sangat lemah berakibat kepada manajemen usaha yang tidak maksimal. Dikarenakan tidak memahami konsep dan fungsi pembukuan, dalam usahanya selama ini, Rina tidak melakukan pencatatan maupun pemisahan antara dana untuk berjualan seperti pengeluaran dan pemasukan, dengan dana yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini

berdampak pada kesulitan dalam mengatur keuangan (alokasi dana untuk membeli bahan dan barang habis pakai lainnya) serta kesulitan dalam penghitungan untung-rugi, sehingga Rina merasa bahwa tidak ada keuntungan yang dirasakan dalam berjualan, dan semua dana hasil usaha dipakai secara keseluruhan untuk kehidupan. Tidak ada dana khusus untuk berjualan.

Masalah lain yang dihadapi karena lemahnya pengetahuan dan pengalaman berbisnis adalah kesulitan dalam memaksimalkan sumber daya manusia dan juga bahan untuk berjualan. Untuk sumber daya manusia, dikarenakan tidak mampu mengatur dan memaksimalkan waktu, Rina kesulitan menerima pesanan dalam jumlah besar, yang pada dasarnya dapat membantu keadaan ekonominya. Rina menceritakan kondisi di saat usahanya memiliki tambahan sumber daya, namun dikarenakan ketidakpercayaan melepaskan pembuatan kue kepada orang lain, dan juga karena hanya mempekerjakan tenaga tambahan paruh waktu dan belum banyaknya pesanan saat itu, Rina tidak meneruskan metode tersebut sehingga sekarang masih bekerja sendiri dalam membuat semua pesannya. Efek dari hal ini selain pembagian waktu yang tidak efektif, secara fisik Rina juga mengalami penurunan kesehatan sehingga ada kalanya Rina tidak menerima pesanan agar dapat beristirahat.



Gambar 2. Rina memproduksi kue pisang di rumah sebagai tempat produksi

Isu ini juga tampak hadir dalam kasus lain, di mana usaha Rina, yang disebut dengan ‘Dapua Kamba’ pernah menggunakan tempat berjualan yang tetap yaitu toko kecil. Metode ini juga tidak berlangsung lama dikarenakan tidak maksimalnya penjualan dan sulitnya mobilisasi antara tempat produksi (rumah) dengan toko tempat Rina berjualan. Rina menambahkan, kondisi penjualan menggunakan toko menarik pembeli yang berbeda dari yang selama ini menjadi pelangganya, dalam arti pembeli akan memilih kue dalam jumlah sedikit namun lebih bervariasi. Pada akhirnya, terdapat banyak sisa kue dikarenakan variasi yang ditawarkan sedikit, sedangkan Rina tidak mampu untuk meragamkan dagangan dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas. Kesulitan mobilisasi dalam kasus ini merupakan proses pengantaran atau penjemputan kue dari rumah Rina ke tempat jualan, dikarenakan keluarga Rina hanya memiliki motor, maka pengangkutan tidak bisa dilakukan dalam jumlah banyak. Terlebih lagi, kendaraan yang dimiliki juga digunakan untuk pengantaran dan penjemputan anak mereka dari sekolah. Pada akhirnya, toko Dapua Kamba ditutup dan Rina kembali berjualan dari rumah di mana penjualan fokus kembali disesuaikan dengan pesanan pelanggan.



Gambar 3. Bolu pandan dan brownies jualan Dapua Kamba

Marketing yang Rina lakukan untuk mempromosikan Dapua Kamba juga terkendala pada *branding*. Hal ini terjadi dikarenakan pengenalan produk-produk hanya dilakukan melalui satu media sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Selama ini, usaha promosi untuk Dapua Kamba dilakukan melalui Whatsapp kepada teman-teman, keluarga serta kenalan dari Rina dan keluarganya. Selebihnya promosi dilakukan antarpelanggan, di mana penambahan pembeli dikarenakan adanya relasi atau interaksi dengan pelanggan sebelumnya. Namun saat ditanya mengapa pemasaran tidak dilakukan melalui media sosial lain seperti Facebook dan Instagram, Rina kembali menyampaikan terkait kesulitannya dalam membagi waktu dan keengganannya dalam menambah tenaga bantuan.



Gambar 4. Stiker nama Dapua Kamba yang ditempel pada setiap kotak kue

Masih terhubung dengan keterampilan berbisnis, permasalahan terakhir merupakan tidak adanya kekhasan dalam produk jualan Dapua Kamba. Hal ini berakibat pada jangkauan pelanggan yang sempit. Dikarenakan jenis produk yang dijual juga sudah dalam jumlah tinggi di pasaran, maka ini membuat produk Rina tidak menonjol, ditambah dengan kesulitan produksi dan masalah lainnya. Sejauh ini, Rina menyampaikan bahwa tidak ada kesulitan dalam mendapatkan bahan dalam membuat produknya, sehingga bisa disimpulkan bahwa bahan baku bukan merupakan masalah pada kasus Dapua Kamba.

Jika dievaluasi dari keadaan Rina, maka permasalahan utama adalah kelemahan dalam pengetahuan dan keterampilan berbisnis. Dampaknya jelas pada manajemen usaha yang bercabang kepada pembukuan, efektivitas tenaga, bahan dan waktu, pemasaran dan juga *branding*. Dengan mempertimbangkan hal ini, maka harus ada bimbingan kepada Rina agar dapat melakukan usaha secara efektif dan efisien, agar dapat mendatangkan keuntungan dan memberi jaminan finansial. Hal ini krusial mengingat posisi usaha Rina dalam keberlangsungan hidup keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, *Analisa Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Provinsi Sumatera Barat*, 2020
- Harlina, Novia, Kilas Balik Satu Tahun Covid-19 di Sumbar, *Liputan 6* 27 Maret 2021, <https://www.liputan6.com/regional/read/4516063/kilas-balik-satu-tahun-covid-19-di-sumbar> diakses 27 Mei 2021
- Hendra, Noli, 35.457 Warga Sumbar Menjadi Pengangguran Akibat Pandemi Covid-19, *Bisnis.com* 5 November 2020, <https://sumatra.bisnis.com/read/20201105/533/1313982/35457-warga-sumbar-menjadi-pengangguran-akibat-pandemi-covid-19> diakses 27 Mei 2021
- Pemprov Sumbar Beri Sinyal Stimulan Ratusan UMKM Terdampak Covid-19. Sumber <https://langgam.id/pemprov-sumbar-beri-sinyal-stimulan-ratusan-umkm-terdampak-covid-19/> diakses pada 27 Mei 2021
- N.A., <https://langgam.id/dunia-usaha-di-sumbar-lebih-99-persen-umkm-terdampak-covid-19/>
- N.A., Dunia Usaha di Sumbar Lebih 99 Persen UMKM, Terdampak Covid-19, *Langgam.id* 22 Juni 2020,
- Sucahyo, Nurhadi, Perempuan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Butuh Solusi Pemasaran, *VoA Indonesia* 22 Desember 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-butuh-solusi-pemasaran/5708746.html>
- Susilawati, Susilawati, Reinpal Falefi, and Agus Purwoko. "Impact of COVID-19's Pandemi on the Economy of Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (2020): 1147-1156.
- Sustainable Development Goals. Sumber <https://sdgs.un.org/goals> diakses pada 27 Mei 2021
- United Nations, *Sustainable Development Goals*, 2021, <https://sdgs.un.org/goals> diakses 27 Mei 2021

- United Nations, *Sustainable Development Goals: Gender Equality*, 2021, <https://sdgs.un.org/goals/goal5> diakses 27 Mei 2021
- Samodro, Dewanto, *Menteri PPPA RI: Perempuan dan Anak Makin Rentan Karena Covid-19*, Antara News, 2020, <https://sumbar.antaranews.com/berita/345544/menteri-pppa-ri-perempuan-dan-anak-makin-rentan-karena-covid-19> diakses 27 Mei 2021
- Wuryandani, Dewi. "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* (2020).
- Empowerment' to Global Justice: Reclaiming a Transformative Agenda for Gender and Development." *Third World Quarterly* 36 (2): 396–415. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1013341>.
- Duflo, Esther. 2012. "Women Empowerment and Economic Development." *Journal of Economic Literature* 50 (4): 1051–79. <https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051>.
- Kabeer, Naila. 2016. "Gender Equality, Economic Growth, and Women's Agency: The 'Endless Variety' and 'Monotonous Similarity' of Patriarchal Constraints." *Feminist Economics* 22 (1): 295–321. <https://doi.org/10.1080/13545701.2015.1090009>.
- Mehra, Rekha. 1997. "Women, Empowerment and Economic Development." *The Annals of The American Academy of Political and Social Science* 554: 136–49.
- Mosedale, Sarah. 2005. "Assessing Women's Empowerment: Towards a Conceptual Framework." *Journal of International Development* 17 (2): 243–57. <https://doi.org/10.1002/jid.1212>.
- UN Women, and UN Global Compact Office. 2011. "Women's Empowerment Principles: Quality Means Business."
- United Nations. n.d. "Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls." Accessed May 27, 2021. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>.
- United Nations Development Program. n.d. "Gender Inequality Index (GII)." <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii>.

- World Health Organization. 2018. "Millenium Development Goals (MDGs)." 2018. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-\(mdgs\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)).
- . 2021a. "Gender Empowerment Measure Value." 2021. <https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3671>.
- . 2021b. "Gender Inequality Index (GII)." 2021. [https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/gender-inequality-index-\(gii\)](https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/gender-inequality-index-(gii)).
- . 2021c. "Sustainable Development Goals (SDGs)." 2021. https://www.who.int/health-topics/sustainable-development-goals#tab=tab_1.
- World Vision. 2021. "Understanding Women Empowerment." 2021. <https://www.worldvision.com.au/womens-empowerment/>.

